

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KURATOR DALAM  
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT  
TERHADAP TAGIHAN YANG TIMBUL  
KARENA UNDANG-UNDANG**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Dorley Frenly Gurning  
2240057012**



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KURATOR DALAM  
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT  
TERHADAP TAGIHAN YANG TIMBUL  
KARENA UNDANG-UNDANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H.) pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Dorley Frenly Gurning  
2240057012



**PROGRAM STUDI HUKUM  
PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
JAKARTA  
2025**

**VISI DAN MISI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

**VISI**

"Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

**MISI**

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing diera global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan:

**Nama** : Dorley Frenly Gurning  
**NIM** : 2240057012  
**Program Studi** : Hukum  
**Fakultas** : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul **“Pertanggungjawaban Hukum Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Tagihan Yang Timbul Karena Undang-Undang”** adalah

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya skripsi saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari Kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya skripsi ini dianggap batal.

Jakarta, 5 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



Dorley Frenly Gurning  
NIM: 2240057012



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

Oleh:

Nama : Dorley Frenly Gurning  
NPM : 2240057012  
Program Studi : Hukum  
Progam Kekhususan : Hukum Ekonomi  
: Pertanggungjawaban Hukum Kurator Dalam  
Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap  
Tagihan Yang Timbul Karena Undang-Undang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Jakarta, 5 Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing

Pembimbing II

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)  
NIDN: 0302117904

(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.)  
NIDN: 0320128201

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum)  
NIDN: 0327046303



(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)  
NIDN: 0302117904



## UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

### PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 5 Februari 2025 Telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi Sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia,

Nama	:	Dorley Frenly Gurning
NPM	:	2240057012
Program Studi	:	Hukum
Peminatan	:	Hukum Ekonomi

Termasuk ujian Skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Tagihan Yang Timbul Karena Undang-Undang”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan dalam Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.

Ketua

2. Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.

Anggota

3. Dr. Poltak Siringo-ringgo, S.H., M.H.

Anggota



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Pertanggungjawaban Hukum Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta  
Pailit Terhadap Tagihan Yang Timbul Karena Undang-Undang.**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

**Nama** : Dorley Frenly Gurning  
**NIM** : 2240057012  
**Program Kekhususan** : Ekomoni

Telah Diperiksa di depan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 5 Februari 2025 dan  
dinyatakan memenuhi syarat :

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I  
(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)

Pembimbing II  
(Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Dr. Poltak Siringo-ringgo, S.H., M.H.)



### PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dorley Frenly Gurning  
NIM : 2240057012  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi  
Judul : **Pertanggungjawaban Hukum Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Tagihan Yang Timbul Karena Undang-Undang**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugak akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundungan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta

Pada Tanggal 5 Februari 2025



Dorley Frenly Gurning

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, kasih, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Tagihan Yang Timbul Karena Undang-Undang”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungannya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi Partama yang selalu membimbing, memberikan masukan, arahan, petunjuk, semangat serta perbaikan dalam dalam penulisan skripsi ini sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Thomson Situmeang, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang dengan baik selalu meluangkan waktunya dalam hal membimbing, memberi masukan, arahan, petunjuk dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Poltak Siringo-ringgo, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan Penulis banyak masukan dan saran.
7. Seluruh Dosen program studi Fakultas Hukum dan staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atas dukungan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
8. Penulis juga mengucapkan terima kasih spesial terkhusus untuk Isteri tercinta Linda Sitorus beserta anakku jagoanku Gerald Hotmangaradja Josaphat Gurning yang telah memberikan dukungan dan semangat bagi penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan masukan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan masyarakat secara luas.

Jakarta, 5 Februari 2025

Dorley Frenly Gurning

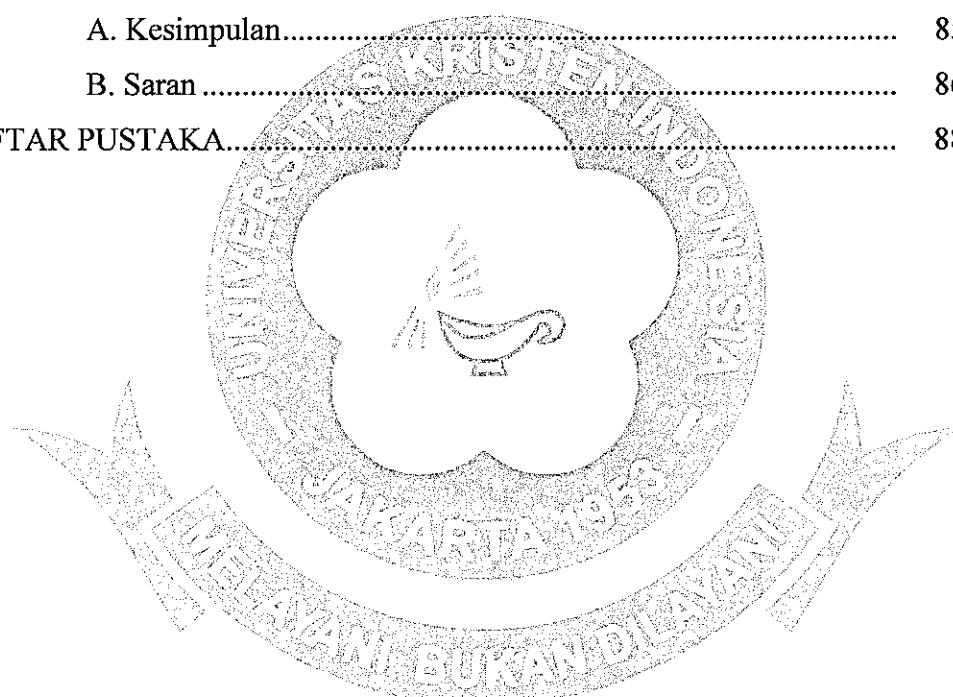
NIM: 2240057020

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
VISI DAN MISI .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
1. Kerangka Teori .....	7
2. Kerangka Konsep .....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Metode Pendekatan .....	13
3. Jenis Data dan Bahan Hukum .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	16
5. Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Teori Kepastian Hukum dan Teori Perlindungan Hukum.....	18
1. Teori Kepastian Hukum .....	18
2. Teori Perlindungan Hukum .....	18

B. Kepailitan di Indonesia .....	22
1. Pengertian Kepailitan .....	22
2. Asas-asas Kepailitan.....	24
3. Prinsip Umum Kepailitan.....	25
4. Syarat-syarat Kepailitan .....	29
5. Utang Dalam Kepailitan.....	29
6. Sifat Tagihan .....	31
7. Proses Kepailitan.....	32
8. Pihak-pihak Dalam Kepailitan .....	33
9. Akibat Hukum Kepailitan .....	35
10. Putusan Pailit.....	36
C. Peran Kurator dalam Kepailitan di Indonesia.....	37
1. Pengertian Kurator .....	37
2. Tugas dan Tanggungjawab Kurator .....	38
3. Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Kurator..	39
4. Kurator yang diangkat dalam Putusan Pailit.....	40
<b>BAB III : SIFAT TAGIHAN ATAS SUATU PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DI INDONESIA .....</b>	<b>43</b>
A. Kasus Posisi.....	43
B. Identifikasi Ganti Kerugian Lingkungan Hidup Sebagai Utang Dalam Kepailitan.....	47
C. Identifikasi Sifat Tagihan Ganti Kerugian Lingkungan Hidup Dalam Kepailitan.....	53
<b>BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR YANG ALAMATNYA DIKETAHUI KURATOR NAMUN TIDAK MEMBERITAHUKAN KE KREDITOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG .....</b>	<b>65</b>
A. Kedudukan Hukum Debitor dan Kreditor Dalam Kepailitan.	65
1. Kedudukan Hukum Debitor .....	65
2. Kedudukan Hukum Kreditor .....	67

3. Analisis Kedudukan Hukum KLHK selaku Kreditor dan	
PT RKK selaku Debitor .....	73
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor .....	75
C. Upaya Hukum Kreditor (Renvoi) .....	80
D. Pertanggungjawaban Kurator .....	82
BAB V : PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88



## **ABSTRAK**

A. Nama	:	Dorley Frenly Gurning
B. NIM	:	2240057012
C. Peminatan	:	Hukum Ekonomi
D. Judul	:	Pertanggungjawaban Hukum Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit Terhadap Tagihan Yang Timbul Karena Undang-Undang
E. Halaman	:	90 Halaman
F. Kata Kunci	:	Kepailitan, Kurator, Sifat Tagihan, Renvoi
G. Ringkasan Isi	:	

Asas *erga omnes* dalam kepailitan membawa implikasi putusan tersebut bersifat final dan mengikat bagi semua pihak, termasuk di luar pihak-pihak yang beracara. Untuk menjamin terpenuhinya asas pelindungan hukum dan kepastian hukum, Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang mengatur bahwa putusan pailit harus diumumkan sesuai asas *promulgatie*. Asas ini memberikan tiga tugas utama kepada kurator yaitu: 1) mengumumkan putusan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (4) UU KPKPU; 2) melakukan pemberitahuan kepada kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (3); dan 3) mengumumkan dalam surat kabar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 15 UU KPKPU.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber hukum utama yang digunakan meliputi Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (UU No. 37/2004), putusan pengadilan yang terkait dengan perkara tersebut, yaitu Putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2023//PN.Niaga MDN. No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn serta literatur hukum sekunder.

PT Ricky Kurniawan Kertapersada merupakan sebuah badan hukum yang diputus pailit berdasarkan Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn KLHK. Dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim menimbang bahwa KLHK termasuk kreditor yang memiliki piutang dengan bukti berupa Putusan-putusan Pengadilan yang sudah *inkracht van gewijsde*. Namun, setelah putusan pailit Tim Kurator PT RKK tidak memberitahukan kepada KLHK mengenai pailitnya debitornya sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU. Atas tindakan Tim Kurator KLHK mengajukan permohonan revvoi terhadap kepailitan PT RKK. Tulisan ini akan menganalisis mengenai hak KLHK sebagai kreditor dari PT RKK dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh KLHK. Selain itu, akan dianalisis pula pemenuhan asas kepastian hukum dan pelindungan hukum dalam Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Mdn dan Putusan Nomor 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn.

H. Daftar Acuan	:	39 buku; 6 Peraturan Perundang-Undangan; 16 jurnal; 1 Peraturan Pemerintah; 2 Putusan Pengadilan dan 1 Kode Etik
I. Dosen Pembimbing I	:	Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II	:	Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.

## ***ABSTRACT***

- A. Name : *Dorley Frenly Gurning*  
B. NPM : 2240057012  
C. Intention : *Economic Law*  
D. Title : *Legal Liability of the Curator in the Management and Settlement of Bankruptcy Assets Against Bills Arising from the Law*  
E. Pages : 90 Pages  
F. Key Word : *Bankruptcy, Curator, Nature of the Claim, Renvoi*

G. Summary of Contents :

*The principle of erga omnes in bankruptcy implies that the decision is final and binding for all parties, including those outside the parties. To ensure the fulfillment of the principle of legal protection and legal certainty, Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Debt Payment Postponement Obligations regulates that bankruptcy decisions must be announced in accordance with the promulgation principle. This principle gives three main tasks to the curator, namely: 1) announce the bankruptcy decision as stipulated in Article 15 paragraph (4) of the KPKPU Law; 2) notify creditors as stipulated in Article 86 paragraph (3); and 3) publish in newspapers as stipulated in Article 15 of the KPKPU Law.*

*This research uses normative juridical legal research methodology with a case study approach. The main legal sources used include the KPKPU Law (Law No. 37/2004), court decisions related to the case, namely Decision No. 04/Pdt.Sus-Bankruptcy/2023/PN.Niaga Mdn. No. 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn as well as secondary legal literature.*

*PT Ricky Kurniawan Kertapersada is a legal entity that was declared bankrupt based on Decision Number 4/Pdt.Sus-Bankruptcy/2023/PN.Niaga Mdn KLHK. In the Decision, the Panel of Judges considered that KLHK is a creditor with receivables with evidence in the form of Court Decisions that have been inkraft van gewijsde. However, after the bankruptcy verdict, the Curator Team of PT RKK did not notify KLHK of the bankruptcy of its debtors in accordance with the Bankruptcy and PKPU Law. Due to the actions of the Curator Team, KLHK filed a *revoi* application against the bankruptcy of PT RKK. This paper will analyze the rights of KLHK as a creditor of PT RKK and legal efforts that can be made by KLHK. In addition, it will also analyze the fulfillment of the principles of legal certainty and legal protection in Decision Number 4/Pdt.Sus-Bankruptcy/2023/PN.Niaga Mdn and Decision Number 18/Pdt.Sus-Renvoi/2023/PN Niaga Mdn.*

- H. Reference List :  
I. Supervisor I : Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.  
Supervisor II : Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H.